

# IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BOARD IN RASAU JAYA DUA VILLAGE, RASAU JAYA SUB-DISTRICT, KUBURAYA REGENCY

by

ULFA SARI<sup>1\*</sup>

Student Number: E1011171067

Drs. Sukamto, M. Si<sup>2\*</sup>, Martinus, S. Sos, M. Si<sup>2\*</sup>

\*Email: [Ulfasari@student.untan.ac.id](mailto:Ulfasari@student.untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

## ABSTRACT

This study aims to reveal the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Board (BPD) in Rasau Jaya Dua Village, Rasau Jaya Sub-District, Kuburaya Regency. The type of research used was descriptive qualitative by selecting 5 informants, namely the Village Head, BPD Chair, Village Staff, BPD Members and community leaders who were selected using the purposive sampling technique with informants who have knowledge and information about the problems under study. Data were collected using instruments in the form of observation and documentation and developed interviews with informants. The results of this study show that the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Board (BPD) has been running well, which can be seen in the standards (measuring instruments) that the BPD uses based on the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) of the Republic of Indonesia No.110 of 2016; however, the BPD's evaluation of the village head's performance in supervising infrastructure development has not been optimal because there are work programs that have not been completed and there are no performance reports, and the corrective steps carried out by the BPD have not been followed up by the BPD as a supervisory instrument regarding the irregularity phenomenon. By using the theory of supervision, proposed by Manullang, it is expected that the implementation of the supervisory function of the BPD in Rasau Jaya Dua Village, Rasau Jaya Sub-District, Kuburaya Regency, can be implemented.

**Keywords** : Village Consultative Board (BPD), Implementation, Supervision, Function, Village.



**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA RASAU JAYA DUA  
KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBURAYA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi pengawasan BPD di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya . Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 5 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Staff Desa, Anggota BPD dan tokoh masyarakat orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan dokumentasi serta dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sudah berjalan dengan baik dapat dilihat pada standar (alat ukur ) yang BPD gunakan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No.110 Th. 2016, hanya saja BPD melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa dalam mengawasi pembangunan infrastuktur belum optimal karena terdapat program kerja yang belum selesai dan tidak adanya laporan kinerja , dan langkah perbaikan yang dilaksanakan BPD belum adanya tindak lanjut dari pihak BPD sebagai instrumen pengawas atas fenomena penyimpangan tersebut. Dengan menggunakan teori pengawasan menurut Manullang diharapkan dapat terlaksananya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Kata kunci : BPD,Pelaksanaan, Pengawasan, Fungsi, Desa

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya”. Judul ini peneliti pilih karena melihat fakta bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum optimal, hal tersebut dibuktikan melalui beberapa data yang diperoleh peneliti. Fokus dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Proses Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa Rasau Jaya Dua, Ketua BPD Rasau Jaya Dua, Staff desa, Anggota BPD dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Manullang (2005:184) menjelaskan proses yang dilakukan dalam pengawasan melalui tiga fase yaitu Menetapkan alat pengukur (standar), Menilai ( evaluasi)dan Mengadakan tindakan perbaikan ( koreksi). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Hasil penelitian ini terdiri dari 3 aspek yaitu: BPD dalam menentukan standar pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 110 Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dengan menggunakan metode pengawasan langsung dan tidak langsung. Kedua BPD melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur belum optimal, Hal ini dapat terlihat dari program kerja kepala desa yang tidak kunjung terealisasi.

Dalam melakukan langkah perbaikan pihak BPD. BPD melakukan tindakan perbaikan dalam mengawasi kinerja kepala desa dikatakan belum optimal. Melihat bahwa belum terealisasinya program kerja pemerintah desa yang seharusnya dilakukan tindakan perbaikan oleh BPD namun hingga sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak BPD sebagai instrumen pengawas atas fenomena penyimpangan

Dengan analisis ini diharapkan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD dapat berjalan dengan lebih baik lagi sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.